

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Pada bagian bab ini, peneliti akan memberikan uraian deskripsi dari hasil penelitian mengenai Konstruksi Populisme Agama dalam Demokrasi Pancasila Berdasarkan Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dengan dua simpulan, yakni simpulan umum dan simpulan khusus. Pada bagian simpulan umum, peneliti akan memberikan deskripsi dari hasil penelitian secara umum, sedangkan pada bagian simpulan khusus berupa simpulan berdasarkan dari hasil rumusan masalah. Adapun deskripsi simpulan umum akan dideskripsikan sebagai berikut:

5.1.1 Simpulan Umum

Gerakan populisme Islam bukanlah hal yang asing di Indonesia. Dalam sejarahnya, pada awal abad ke-20 di Indonesia, bisa disebut sebagai artikulasi politik berbasis pada identitas keislaman dengan nuansa semangat nasionalismeyang anti kolonial. Salahsatu organisasi pada masa itu yaitu dengan adanya pergerakan Sarekat Islam yang dipimpin oleh Tjokroaminoto dengan semangat menentang sistem ekonomi kolonial. Sarekat Islam ini, disebut sebagai penanda kemunculan populisme Islam di Indonesia.

Dalam taraf diskursif, kerangka yang dibangun oleh Sarekat Islam dengan mengartikulasikan politik populisme dengan mewacanakan sikap anti populisme dengan kemunculan dalam bentuk politik Islam yang emansipatif. Artikulasi politik berbasis identitas keislaman yang diwakili oleh Sarekat Islam ini merupakan salahsatu bentuk populisme Islam lama. Membangun garis pemisah yang tegas antara “rakyat” yang tertindas dan “elite” yang menindas. Misalnya pada aspirasi politik yang menentang kolonialsime dan sistem ekonomi kapitalistik Hindia Belanda yang dapat dilihat dalam kerangka populisme Islam lama. Dalam pergerakannya populisme tidak selalu konstan dengan menerapkan isu apa yang akan disuarakan, namun bergantung pada kondisi factual dan dianggap krusial oleh masyarakat.

Pergerakan populisme agama atau populisme Islam mendapatkan titik

momentum krusial pada tahun 2016 sampai pemilihan presiden tahun 2019 sebagai puncak terbentuknya gerakan populisme Islam sebagai politik identitas yang secara sporadis menghasilkan preferensi pilihan bebas dalam proses demokrasi. Gerakan populis tersebut merupakan pola implikasi langsung dari pernyataan kontroversial Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur Jakarta yang pada saat itu menyinggung Qur'an Surat Al-Maidah. Pernyataan demikian, tentu menimbulkan kemarahan dan kekecewaan masyarakat muslim yang kemudian dimobilisasi oleh GNPF MUI dan FPI. Salah satu gerakan perlawanan tersebut adalah Aksi Bela Islam yang diikuti oleh berbagai kelompok organisasi dengan motivasi berbeda yang mencerminkan terhadap korelasi di antara gerakan sosial dengan populisme Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara bersama para narasumber dari perspektif berbagai pandangan tokoh agama dan pakar demokrasi dalam memaknai persepsi populisme Islam di Indonesia. Para narasumber dari pandangan berbagai tokoh agama memberikan pandangan makna bahwa tidak keberatan dengan adanya gerakan populisme Islam sejauh pelaksanaan populisme tersebut tidak melakukan upaya mengganggu nilai-nilai agama dan tidak menjadikan agama sebagai alat politik dalam memenangkan kekuasaan maupun kepentingan. Sehingga populisme Islam bisa mendapatkan legitimasi dari berbagai agama dengan menerapkan prinsip keberagaman dan upaya penguatan demokrasi Pancasila untuk menyuatkan kepentingan semua warga negara.

5.1.2 Simpulan Khusus

Adapun deskripsi simpulan khusus berdasarkan rumusan masalah akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Persepsi pemaknaan kelompok berbagai agama dalam memberikan pemaknaan terhadap fenomena gerakan populisme Islam di Indonesia. Persepsi pemaknaan populisme Islam mewacana dengan adanya pengkonstruksian atas apa yang disebut sebagai umat. Umat ini merujuk pada sebuah entitas yang spesifik, homogen dan otentik, yang dalam bentuk populisme Islam merujuk pada pemeluk Islam itu sendiri sebagai yang mempunyai iman yang sama. Istilah umat mengalami homogenisasi baik sebagai wujud materil ataupun maknanya.

Edah Jubaedah, 2022

KONSTRUKSI POPULISME AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA BERDASARKAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Fenomena gerakan populisme Islam yang terjadi dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial pada analisis pendekatan gerakan struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*), sumber daya mobilisasi (*resource mobilization*), pembedaan budaya atau isu (*cultural framing*). Pada pendekatan kesempatan politik (*political opportunity structure*) gerakan sosial dapat muncul dan berkembang disebabkan adanya perubahan dalam struktur politik, dan hal ini diartikan sebagai kesempatan dalam momentum Pilkada DKI Jakarta sebagai titik puncak populisme Islam. Pada pendekatan sumber daya mobilisasi (*resource mobilization*) dalam fenomena gerakan populisme Islam terdapat variabel pendukung seperti adanya dukungan simpatisan, media dan sumber daya dana dalam melakukan gerakan. Sumber daya simpatisan dipelajari oleh GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) yang kemudian berubah menjadi GNPf Ulama (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama). Pada pendekatan (*cultural framing*) dengan munculnya *diagnostic framing* penistaan terhadap Al-Qur'an dan ulama serta memproses hukum yang tidak adil.

- 2) Konstruksi populisme agama dalam perspektif demokrasi Pancasila. Dalam konteks demokrasi, populisme juga diwujudkan sebagai pilar demokrasi dengan wujud indikator kesehatan sistem demokrasi representasi atas kemungkinan tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ sistem politik. Populisme diakui sebagai cermin demokrasi untuk meminjam istilah agar elit tidak lupa menyerap sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Kehadiran populis hadir sebagai bentuk *check and balances* institusional yang bisa mendorong untuk kembali sesuai aturan main demokrasi dan mampu menguatkan Pancasila dengan mengimplementasikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena gerakan populisme Islam seperti pada gerakan Aksi Bela Islam tidak terbukti dengan menggunakan cara untuk melanggar demokrasi. Karena pada prinsipnya gerakan populisme tersebut mengagendakan pada upaya penguatan proses hukum atas kasus

penistaan agama serta tidak adanya agenda politik lain yang memiliki implikasi terhadap ancaman demokrasi di Indonesia.

- 3) Konstruksi populisme agama dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Fenomena gerakan populisme Islam mendapatkan legitimasi sebagai upaya penguatan keterlibatan warga negara (*civic engagement*) dengan taraf signifikansi pada adanya upaya dukungan terhadap penguatan karakter warga negara yang demokratis dengan menerapkan sikap dan pola perilaku menghargai pluralisme, religious, memiliki toleransi, memiliki komitmen untuk mampu mewujudkan kepentingan warga negara serta komitmen kuat terhadap konstitusi dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam bingkai kehidupan sosial politik warga negara. Maka, konstruksi populisme Islam dalam fenomena gerakan aksibela Islam dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dapat direfleksikan sebagai *civic engagement* akan dibentuk dari adanya *civic awareness* (kesadaran warga negara) dan *civic participation* (partipasi warga negara). Kesadaran warga negara ini didasari atas kesadaran yang bersifat tulus, insiatif tanpa adanya paksaan dari pihak ketiga ataupun oranglain. Sehingga, dalam urusan negara, partisipasi ini didasarkan pada dorongan individu untuk senantiasa melibatkan dirinya dalam pemecahan masalah yang ada pada dinamika kehidupan bernegara.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan umum dan simpulan khusus di atas, maka peneliti dapat memberikan deskripsi implikasi pada penelitian mengenai konstruksi populisme agama dalam demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan memberikan dua implikasi yakni pada implikasi teoretis dan implikasi praktis. Adapun implikasi dalam penelitian ini akan diuraikan dalam deskripsi di bawah ini:

5.2.1 Implikasi Teoretis

- 1) Tersusunnya analisis basis penelitian khususnya mengenai populisme Islam dalam demokrasi Pancasila berdasarkan perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dengan menerapkan analisis pergerakan populisme dengan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila.

- 2) Terkonstruksinya makna populisme Islam dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimaknai sebagai gerakan kultural masyarakat dalam menyuarakan aspirasi antara rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan pada nilai-nilai agama yang tidak keluar dari prinsip demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia. Sehingga persepsi pemaknaan populisme Islam tidak lagi dinarasikan sebagai gerakan yang mengancam demokrasi sebagaimana narasi liar yang tidak berdasarkan pada pendekatan kajian ilmiah.
- 3) Dikembangkannya *applied theory* dalam analisis populisme berdasarkan pada teori demokrasi *the breaking down of democratic rezims* dengan menerapkan analisis kriteria prinsip pada penyelenggaraan aturan main demokrasi yaitu analisis penolakan atas aturan main demokrasi, analisis menyangkal legitimasi lawan politik, analisis toleransi atau anjuran kekerasan dan analisis terhadap kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan.
- 4) Dikembangkannya *applied theory* dalam analisis gerakan populisme Islam berdasarkan teori struktur kesempatan politik, mobilisasi sumber daya dan *framing* dalam gerakan sosial.
- 5) Dikembangkannya *applied theory* dalam analisis gerakan populisme Islam perlu memberikan orientasi pendekatan gerakan dengan didasarkan pada penguatan keterampilan kewarganegaraan secara komperhensif dalam aspek perlunya penguatan pengetahuan, sikap dan keterlibatan kewarganegaraan. Sehingga pada basisnya, keterlibatan gerakan populisme Islam memberikan kontribusi yang baik terhadap penguatan demokrasi Pancasila di Indonesia dan tidak terjebak pada fenomena populisme yang diadopsi dari budaya luar yang tidak selaras dengan penerapan prinsip penyelenggaraan demokrasi Pancasila.
- 6) Kritik ilmiah pada penelitian-penelitian terdahulu yang memberikan analisis diametral terhadap narasi populisme Islam mengancam demokrasi yang tidak berdasarkan pada kajian analisis ilmiah. Sehingga *out put* dari penelitian ini memberikan konstruksi pemahaman dan sikap mengenai populisme sebagai gerakan kultural warga negara dalam menyuarakan kehendak aspirasi warga negara kepada pemerintah sebagai wujud penguatan demokrasi Pancasila dalam menyuarakan kebebasan berekspresidan

penguatan demokrasi Pancasila.

5.2.1 Implikasi Praktis

- 1) Memaknai populisme Islam yang ada di Indonesia tidak bisa disamakan dengan analisis preferensi fenomena gerakan populisme yang ada di Barat, karena basisnya pada fenomena gerakan populisme Islam di Indonesia memiliki ideologi yang harus selaras pada Pancasila. Sehingga, representasi wujud populisme Islam, hendaknya selalu mengutamakan pada upaya penguatan demokrasi Pancasila dengan memiliki pola sikap dan karakter warga negara yang demokratis seperti menghargai pluralisme, memiliki jiwa toleransi, memiliki pengangan agama yang kuat, tidak bersifat sekuler, memiliki rasa solidaritas tinggi dalam berbangsa, memiliki komitmen untuk mampu mewujudkan kemakmuran bersama serta memiliki komitmen yang kuat terhadap konstitusi dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam demokrasi Pancasila.

5.3 Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam penelitian ini akan dideskripsikan dalam uraian sebagai berikut:

5.3.1 Pemerintah

Memaknai gerakan populisme Islam adalah gerakan sosial kultural biasa. Sehingga pemerintah hendaknya memberikan sikap terbuka, tidak anti kritik dan menempatkan pada posisi untuk kepentingan warga negara dalam menyikapi aspirasi yang disuarakan oleh warga negara sebagai upaya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

5.3.2 Aktor Populis

Gerakan populisme Islam merupakan gerakan politik yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila. Maka, dalam merepresentasikan gerakannya hendaknya menempatkan pada prinsip-prinsip aturan penyelenggaraan demokrasi seperti tidak melakukan menggunakan cara untuk menolak konstitusi, mengusulkan cara anti demokrasi, berusaha mengubah konstitusi dengan kudeta,

perlawanan, menyangkal legitimasi lawan politik, menganjurkan kekerasan dan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media.

5.3.3 Masyarakat

Bagi masyarakat, hendaknya tidak terjebak dalam memaknai fenomena gerakan populisme Islam secara instan hanya dari media yang diberitakan. Sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan dalam memahami dan menangkap informasi secara menyeluruh dan bersifat valid agar tidak terpolarisasi pada kepentingan kelompok maupun elite tertentu yang akan membahayakan bagi integrasi bangsa.

5.3.4 Civitas Akademika Pendidikan Kewarganegaraan

Bagi civitas akademika Pendidikan Kewarganegaraan, hendaknya mengoptimalkan peran keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa khususnya dalam mengoptimalkan pendidikan politik serta memberikan analisis dan refleksi bahwa populisme Islam tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila serta mampu melembagakan penelitian komunikasi politik khususnya dalam konteks keislamaan terkait demokrasi.

5.3.5 Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mengembangkan kajian penelitian dengan perbandingan penelitian mengenai dinamika perkembangan populisme Islam di Indonesia pasca Gerakan Aksi Bela Islam dan Pilpres 2019 dalam konteks demokrasi. Agar penelitian ini dapat direfleksikan secara berkesinambungan dan menjadi wahana pemahaman masyarakat dalam memaknai populisme Islam di Indonesia agar tidak terjebak pada narasi liar yang hanya diberitakan oleh satu informasi.

5.4 Dalil-Dalil

Berdasarkan pada hasil riset di atas, maka peneliti akan mendeskripsikan pengembangan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Populisme Islam diakui sebagai wujud negara demokrasi dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik pada kedaulatan hak dan kewajiban bagian dari kehidupan bernegara. Perwujudan dalam partisipasi warga negara digambarkan pada bentuk kontribusi warga negara.
- 2) Islam tidak boleh berdiri dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan negara.

Dalam hal ini, yang khususnya sangat penting adalah tidak menempatkan Pancasila sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Melainkan keduanya harus dipandang sebagai saling pelengkap.

- 3) Menyikapi fenomena populisme Islam seharusnya dilakukan melalui pendidikan politik dan proses penyadaran akan makna sesungguhnya berdemokrasi dan bernegara. Menganggap sistem demokrasi selalu berada di langit suci adalah sebuah gejala kemapanan dan anti-kritik.
- 4) Gerakan politik apa pun yang memberikan suara kritis dan masukan bagi kekuasaan harus disikapi secara dewasa dan wajar, bukan reaksioner dan menuding gerakan kritik tersebut sebagai gerakan ancaman ataupun gerakan disintegrasi bangsa.